

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian utama pemerintah daerah, Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso secara aktif berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi. Meskipun tingkat inflasi di Kabupaten Bondowoso relatif rendah, komoditas seperti beras dan cabai menjadi perhatian karena dapat memengaruhi inflasi. Namun, dampak inflasi tidak terlalu signifikan karena mayoritas penduduk Bondowoso adalah petani padi dan cabai. Pada tahun 2022, laju inflasi diperkirakan dapat memenuhi target sasaran inflasi 3,0 persen. Pemerintah daerah memprioritaskan sektor pertanian sebagai kontributor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi. Selain itu, sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda, serta sektor pariwisata juga diprioritaskan sebagai bentuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 diusulkan sebesar Rp 2.325.523,35

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso meliputi beberapa faktor utama:

- **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi:** Tim pengendalian inflasi daerah harus memahami faktor-faktor seperti kenaikan harga bahan pokok, perubahan kebijakan pemerintah, dan dinamika ekonomi global.
- **Komoditas Penyumbang Inflasi:** Pada tahun 2023, komoditas seperti beras dan cabai menjadi perhatian karena memengaruhi inflasi di Bondowoso.
- **Kerja Sama Antar Daerah:** Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjalin kerja sama dengan daerah lain penghasil bahan pokok surplus, seperti Kabupaten Blitar (penghasil telur), Kabupaten Probolinggo (penghasil bawang merah), dan Banyuwangi (penghasil cabai rawit), untuk mengantisipasi ketersediaan bahan pangan dan menekan inflasi daerah.
- **Potensi Daerah yang Belum Terpetakan:** Pemkab Bondowoso perlu memetakan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengantisipasi inflasi.
- **Ketergantungan pada Pemerintah Pusat:** Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan nasional karena ketergantungan pada pemerintah pusat.
- **Daya Saing Daerah Rendah:** Daya saing daerah yang relatif rendah disebabkan oleh tingkat pengangguran yang masih tinggi, tingkat kemiskinan, dan infrastruktur yang belum memadai.
- **Kondisi Infrastruktur yang Belum Memadai:** Minimnya sarana dan prasarana jalan yang baik menghambat investasi dan distribusi barang/jasa.
- **Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Rendah:** Jumlah penduduk miskin yang meningkat akibat pandemi COVID-19 membebani anggaran pemerintah daerah.
- **Kemampuan Fiskal Daerah yang Rendah:** Struktur APBD didominasi oleh dana perimbangan dan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso melibatkan beberapa langkah strategis:

- **Pemantauan dan Koordinasi Rutin:** Pemkab Bondowoso secara rutin mengikuti rapat inflasi daerah yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri dan melakukan evaluasi untuk mengetahui kenaikan harga.
- **Pengaktifan TPID dan Satgas Pangan:** Pemkab Bondowoso mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan untuk bersinergi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, termasuk melaporkan harga dan ketersediaan komoditas kepada kepala daerah.
- **Kerja Sama Antar Daerah:** Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjalin kerja sama dengan daerah lain penghasil bahan pokok surplus untuk mengantisipasi ketersediaan bahan pangan dan menekan inflasi.
- **Komunikasi Publik:** Pemkab Bondowoso melakukan komunikasi agar publik mengetahui kenaikan harga.
- **Fokus pada Sektor Pertanian:** Pemerintah daerah memprioritaskan sektor pertanian sebagai kontributor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi.
- **Pengembangan BUMD dan Trading House:** Pemerintah Kabupaten Bondowoso didorong untuk mengembangkan BUMD dan Trading House untuk memfasilitasi para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah di bidang produksi kopi.
- **Rakor dengan Bulog:** Pemkab Bondowoso bersama Bulog menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran CPP (beras) guna menekan inflasi harga pangan.
- **Identifikasi Faktor Inflasi:** Tim pengendalian inflasi harus mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di Bondowoso, seperti kenaikan harga bahan pokok, perubahan kebijakan pemerintah, dan dinamika ekonomi global.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso menjadi fokus utama pemerintah daerah, dengan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

- **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi:** Tim pengendalian inflasi harus memahami faktor-faktor seperti kenaikan harga bahan pokok, perubahan kebijakan pemerintah, dan dinamika ekonomi global.
- **Koordinasi dan Evaluasi Rutin:** Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara rutin mengikuti rapat inflasi daerah dan melakukan evaluasi untuk mengetahui kenaikan harga.
- **Strategi 4K:** Penerapan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
- **Kerja Sama dengan Daerah Lain:** Pemerintah menjalin kerja sama dengan daerah lain penghasil bahan pokok surplus untuk mengantisipasi ketersediaan bahan pangan dan menekan inflasi daerah.
- **Fokus pada Sektor Pertanian:** Pemerintah daerah memprioritaskan sektor pertanian

sebagai kontributor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi.

- **Pemanfaatan Potensi Daerah:** Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu memetakan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengantisipasi inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi masalah pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan:

- **Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID):**
 - TPID harus memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi inflasi di Bondowoso, seperti kenaikan harga bahan pokok, perubahan kebijakan pemerintah, dan dinamika ekonomi global.
 - Memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah, instansi, dan pelaku ekonomi lokal.
- **Strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif):**
 - Menerapkan strategi 4K untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- **Kerja Sama Antar Daerah (KAD):**
 - Memperluas KAD untuk memastikan pasokan pangan dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan.
 - Menjalinkan kerja sama dengan daerah lain penghasil bahan pokok surplus, seperti Kabupaten Blitar (penghasil telur), Kabupaten Probolinggo (penghasil bawang merah), dan Banyuwangi (penghasil cabai rawit).
- **Pengembangan Sektor Pertanian:**
 - Memfokuskan pada sektor pertanian sebagai kontributor pembentuk PDRB tertinggi.
 - Mencegah alih fungsi lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
 - Meningkatkan produktivitas lahan yang ada, mengembangkan teknologi pertanian modern, dan penguatan program pemberdayaan petani lokal.
- **Pengembangan BUMD dan Trading House:**
 - Mengembangkan BUMD dan Trading House untuk memfasilitasi UMKM, terutama di bidang produksi kopi.
- **Pemanfaatan Potensi Daerah:**
 - Memetakan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengantisipasi inflasi.
- **Gerakan Peduli Inflasi:**
 - Mendorong gerakan peduli inflasi berbasis rumah tangga dan desa, seperti memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur-mayur.
- **Manajemen Stok dan Resi Gudang:**
 - Melakukan penataan manajemen stok, seperti maksimalisasi resi gudang untuk komoditas pangan yang strategis.
- **Komunikasi Publik:**
 - Melakukan komunikasi agar publik mengetahui kenaikan harga.
- **Evaluasi Rutin:**
 - Melakukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui kenaikan harga dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

